

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sudah menjadi harapan semua orang apabila segala apa yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Apalagi jika hal tersebut dapat terpenuhi dengan lebih mudah terpenuhinya kebutuhan sehari-hari akan memperlancar jalannya aktivitas seseorang. Dengan demikian orang tersebut dapat menjalankan aktivitasnya, seperti sekolah, belajar, berpergian dsb. Semakin terpebuhinya kebutuhan sehari-hari maka akan meningkat kebahagiaan orang tersebut. Memenuhi kebutuhan sehari-hari sama dengan menjaga keberlangsungan hidup manusia.

Namun, pada realita saat ini masih banyak yang belum bisa memenuhi kebutuhannya karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kemiskinan. Orang yang mengalami kemiskinan susah dalam mencari pencaharian dan sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Diantara mereka hanya bisa mencari penghasilan dari pekerjaan yang tidak layak. Sehingga penghasilan yang didapatkan tak menentu dan kebutuhan hidup sehari-hari tidak dapat terpenuhi selalu.

Kemiskinan merupakan ancaman bagi sebuah negara. Bukan hanya negara saja tetapi warga negara juga berusaha untuk menghindari kondisi demikian. Berada pada tingkat ekonomi yang rendah menjadikan seseorang tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan sempurna. Terkadang orang yang taraf ekonominya berada di bawah harus bersusah payah dulu dalam menjaga kebersihan. Masih banyak peristiwa yang belum kita ketahui secara langsung.

Berbicara soal kemiskinan juga berbicara tentang ketimpangan atau kesenjangan. Kedua hal tersebut memiliki hubungan diantaranya yang bisa kita bahas. Bila kita lihat dengan seksama pada realitanya, bahwa salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah harta yang hanya berada pada satu titik tertentu atau dimiliki oleh kelompok tertentu saja. Selain itu, saat ini masih banyak orang yang berpikiran untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Menganggap bahwa harta yang telah didapatkan adalah mutlak miliknya. Hal ini membuat terjadinya persaingan yang sangat kurang sehat. Sehingga orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bersaing menjadi tertinggal dan pada akhirnya jatuh miskin. Padahal apabila kita melihat pada nilai-nilai ekonomi yang benar dan baik, bahwa harta merupakan *public good* yang harus berputar di semua sektor agar ekonomi menjadi lebih sehat.

Fenomena diatas merupakan dampak dari salahnya sistem yang dianut. Tumbangnya sistem ekonomi kapitalis dan sosialis membuat kita sadar butuhnya kehadiran sistem baru yang lebih baik membawa manusia menuju kesejahteraannya. Penerapan nilai-nilai ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan yang hakiki akan menjauhkan dari kemiskinan dan ketimpangan atau kesenjangan.

Kembali membahas masalah kemiskinan dan ketimpangan yang telah terjadi di sekeliling kita. Dilansir dari laporan publikasi BPS menerangkan bahwa kemiskinan di Indonesia pada september 2017 sudah menembus angka 10% atau 26 juta penduduk. Bila kita lihat dan bayangkan angka 26 juta penduduk yang

mengalami kemiskinan merupakan angka yang cukup besar atau jumlah yang tidak kecil. Bila sekiranya ingin kita pukul rata angka kemiskinan tersebut dengan 514 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Maka setiap kabupaten dan kota memiliki jumlah penduduk miskin yang hampir mendekati 51 ribu penduduk. Dengan jumlah tersebut pun masih sangat besar bagi seukuran kota dan kabupaten. Masalah kemiskinan merupakan PR terendiri dan utama bagi kepala negara (bps.go.id, diakses pada tanggal 08 Juni 2018).

Beranjak dari masalah kemiskinan, kita akan mengulik sedikit terkait masalah kesenjangan atau ketimpangan. Menurut KBBI, ketimpangan berarti adanya sebuah cacat atau sesuatu yang tidak baik atau tidak adil. Sedangkan kesenjangan adalah adanya sebuah ketidak seimbangan. Dari lembaga keuangan Swiss menyatakan 1% orang Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional, dan 10% menguasai 75,7% kekayaan nasional. Apabila kita hitung secara matematis, maka 2,65 juta orang menguasai 49,3% kekayaan nasional, 26,5 juta orang menguasai 75,7% kekayaan nasional sedangkan 90% penduduk hanya menguasai atau memiliki 24,3% bagian dari kekayaan nasional (seword.com, diakses pada tanggal 08 Juni 2018).

Dari fenomena ketimpangan diatas dengan data yang sudah dipaparkan dapat kita simpulkan bersama bahwa ketimpangan atau kesenjangan yang terjadi di Negara Indonesia ini masih sangat buruk dan haruslah diperbaiki. Dari zaman kemerdekaan yang dipimpin oleh proklamator kita Ir. Soekarno hingga era Jokowi saat ini angka kemiskinan belum terselesaikan secara tuntas. Buktinya angka

kemiskinan dari awal kemerdekaan hingga saat ini masih diatas angka 20 juta penduduk. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa angka sebesar tersebut masihlah sangat besar. Walau ketika zaman Presiden Soeharto berhasil menekan angka kemiskinan sebesar 40% namun kesenjangan sosial masih curam karena terjadi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang merajalela dari pemerintahannya. Selain itu, pada akhir jabatannya inflasi terjadi kenaikan yang sangat drastis. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan dari dulu hingga saat ini belum terselesaikan secara tuntas.

Preseiden Jokowi mengakui bahwa pemerintahannya belum dapat menuntaskan masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, kesenjangan dan sebagainya. Namun ungapnya akan tetapi pemerintah mempunyai komitmen dalam meningkatkan ekonomi dengan memperbaiki infrstruktur nasional. Kebijakan Jokowi ini banyak menuai kritikan dari politikus. Dengan digencarkannya pembangunan infrastruktur nasional justru menaikkan tingkat kesusahan rakyat miskin. Palsanya, pemerintah Jokowi memotong subsidi, menaikkan pajak listrik, dan menambah hutang negara untuk memperlancar pembangunan. Ini yang menyebabkan rakyat kecil di bawah semakin menjerit karena kebijakan pemerintah (Merdeka.com, diakses pada tanggal 08 Juni 2018).

Berbicara tentang sebuah negara dengan tatanannya yang sejahtera, kita dapat berkaca kepada sebuah negara pada zaman awal Islam yaitu Madinah yang sebelumnya bernama Yathrib. Madinah merupakan prototype atau representatif dari tatanan masyarakat sosial nan sejahtera. Hal ini dapat kita lihat dari Madinah

pra Islam yang telah mengalami beberapa fase kesulitan. Dijelaskan dalam buku Adiwarmam, bahwa Madinah merupakan sebuah daerah yang tak berwaris apa pun. Namun dalam waktu yang relatif singkat, Nabi Muhammad SAW dapat membalikkan keadaan masyarakat Madinah 180 derajat.

Apabila kita melihat dari sejarah Madinah ketika kedatangan Nabi dan para sahabat, kita temukan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Rasul dengan perantara Wahyu-wahyu Allah. Pastinya kebijakan tersebut berpijak atau tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai yang ada dalam piagam Madinah. Kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung pemasukan kas negara dan pro terhadap rakyat Madinah. Sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dari sisi ekonomi.

Ketika Madinah Pra Islam, kota ini merupakan daerah yang sering terjadi kekacauan antara suku-suku di dalamnya. Hal ini juga berdampak pada ekonomi Madinah, seperti pasar yang ada di Madinah. Dituliskan di Buku Madinah (Misrawi:2009) bahwa terjadinya ketimpangan antara suku yahudi dan Arab Madinah karena Suku Yahudi lebih menguasai perekonomian Madinah. Hingga suku arab Madinah yang melakukan transaksi dengan penduduk Yahudi Madinah dikenakan sistem riba. Hal ini yang membuat penduduk arab Madinah iri terhadap penduduk yahudi Madinah.

Kedatangan Nabi Muhammad beserta para sahabat telah melahirkan sebuah peradaban yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Perubahan kondisi tersebut karena lahirnya sebuah kesepakatan antara Kaum Anshar, Kaum Muhajirin, dan Kaum Yahudi Madinah. Kesepakatan tersebut diwadahi dengan

sebuah piagam yang bernama Piagam Madinah. Piagam Madinah ini haruslah disepakati oleh pesertanya. Atas ketaatan atau kepatuhan peserta Piagam telah menjadikan Kota yang dulu bernama Yathrib berubah menjadi kota Madinah. Kota Madinah sendiri berasal dari kata da-na yang berarti taat atau berhutang.

Banyak dari para ahli sejarah barat atau para akademik mengatakan bahwa Piagam Madinah merupakan sebuah konstitusi, naskah politik, amandemen, dan sebagainya. Bila dirujuk dari perkataan Buya Hamka dalam bukunya Keadilan Sosial Dalam Islam bahwa sistem pemerintahan harus diimbangi dengan sistem ekonomi sehingga membentuk keseimbangan. Hamka mengumpamakan politik yang tidak diimbangi dengan ekonomi yang kuat ibarat orang yang mempunyai perut buncit sedangkan kakinya kecil. Menguatkan pernyataan ini Suyuthi Pulungan dalam Bukunya mengatakan bahwa Piagam Madinah memiliki muatan muamalah. Semenetera wahyu yang berkaitan muamalah kala itu belum turun seluruhnya.

Setelah melihat penjelasan sebelumnya bahwa piagam Madinah telah berhasil membawa dampak positif pada daerah Madinah. Ia berhasil merubah kondisi sosial ekonomi Madinah 180 derajat. Perubahan-perubahan yang terjadi pada bidang politik, sosial, pemerintahan, dan salah satunya ekonomi. Enggan munculnya Piagam Madinah membuktikan bahwa Madinah telah menjawab tantangan yang ada.

Banyak tantangan yang harus dihadapi Nabi Muhammad di Madinah. Diketahui bahwa terdapat banyak masalah yang ada di Madinah yang harus diatasi

oleh nabi. Tantangan berupa perbedaan budaya, dan suku merupakan tantangan tersendiri bagi nabi Muhammad sebagai pemimpin tertinggi Madinah. Selain itu, kaum Yahudi Madinah yang dominannya menguasai perekonomian dan telah menerapkan riba juga tantangan yang harus dihadapi oleh kaum muslimin dan nabi Muhammad pada khususnya.

Dalam Piagam Madinah tidaklah terdapat sistem-sistem namun yang ada hanyalah prinsip-prinsip atau nilai. Sebuah prinsip atau nilai tidak akan hangus ketika zaman akan berubah, akan tetapi ia tetap akan hidup beriringan dengan zaman. Salah satu nilai yang terdapat dalam piagam Madinah adalah nilai kesejahteraan. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah rancangan atau konsep untuk membangun kesejahteraan sosial ekonomi yang masih relevan.

Sudah semestinya sebagai pelaku ekonomi mengetahui bahwa ketika terdapat masalah yang ditemukan haruslah dibenahi. Yang demikian bukan bermaksud untuk mengganti sistem yang ada, namun sekedar mengarahkan untuk kembali ke jalan yang baik dan benar. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menganggap perlu dilakukannya penelitian terhadap problematika tersebut. Dalam hal ini penulis mengangkat satu tema penelitian yang berjudul **“Konsep Kesejahteraan Dalam Piagam Madinah”**

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka pokok pembahasan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep yang dimiliki oleh Piagam Madinah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Madinah pada zaman itu?
2. Apakah konsep kesejahteraan yang terdapat dalam piagam madinah masih relevan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bedasarkan rumusan masalah diatas, dapat ditetapkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti lebih dalam dan mengetahui konsep kesejahteraan yang tersirat dalam Piagam Madinah.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep kesejahteraan dalam piagam madinah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian mengenai “Konsep Kesejahteraan Dalam Piagam Madinah” adalah:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, judul yang diambil ini diharapkan dapat membuktikan bahwa dalam teks Piagam Madinah terdapat beberapa nilai tentang kesejahteraan ekonomi yang bisa diterapkan pada sebuah kelompok atau yang lingkupnya lebih besar dari itu. Hal ini menepis beberapa argument bahwa Piagam Madinah bukan hanya merupakan konstitusi sebuah Negara belaka akan tetapi juga mengandung nilai-nilai ekonomi. Harapan lain dari penulisan ini adalah dapat menjadi



rujukan dalam berbagai masalah muamamah atau pun ekonomi Islam.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Akademisi

Semoga hasil dari penulisan ini dapat menambah khazanah keilmuan bagi akademisi dalam bidang sejarah ekonomi islam, moral ekonomi dan muamalah yang terdapat pada Piagam Madinah.

### b. Bagi Peneliti

Harapannya untuk penulis adalah hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang sejarah ekonomi Islam, terkhususnya dalam pengetahuan agam Islam. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam bermu'amalah.